



RANCANGAN AKHIR

Rencana Kerja Perangkat Daerah

2026

**DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen rancangan akhir perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah. Dokumen ini berisi program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai target pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan Akhir Renja SKPD juga mencakup hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang memuat informasi mengenai tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran yang direncanakan untuk tahun 2026. Selain mengacu pada RKPD, Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinkes DIY) disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinkes DIY. Renstra ini sendiri disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022–2027. Penyusunan Rancangan akhir Renja Tahun 2026 juga mempertimbangkan hasil evaluasi capaian Renja sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan strategis baik di tingkat daerah maupun nasional.

Tema pembangunan di DIY tahun 2026 yang tertuang dalam RKPD adalah **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”**. Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi DIY yang trendnya terus meningkat setiap tahunnya perlu diakselerasi agar capaiannya sesuai dengan target nasional.

2. Produktivitas Sektor Unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DIY melalui strategi-strategi penguatan. Sektor unggulan di DIY meliputi sektor pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi didorong pemanfaatannya pada berbagai sektor terutama pada sektor unggulan sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi .

Renja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta berperan sebagai instrumen untuk menyelaraskan kebijakan serta menyinergikan target pembangunan tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah DIY, dan pemerintah kabupaten/kota. Renja Dinkes DIY Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan program, serta pengawasan pembangunan di lingkungan Dinas Kesehatan DIY pada tahun anggaran 2026.

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan DIY



Dr. Pembayun Setyaningastutie, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum.....	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023	2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	2-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2-30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	2-36
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	3-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	3-5
3.3 Program dan Kegiatan	3-10
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	4-1
BAB 5 PENUTUP.....	5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-2
Tabel 2-2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-29
Tabel 2-3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-37
Tabel 2-4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-60
Tabel 3-1	Penyelarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	3-3
Tabel 3-2	Keterkaitan Tujuan, sasaran, strategi dan arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD 2022-2027	3-4
Tabel 3-2	Tujuan dan Sasaran Dinkes DIY.....	3-9
Tabel 3-3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3-10
Tabel 4-1	Program dan Kegiatan 2026.....	4-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan tatacara RKPD	1-2
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan	2-28
Gambar 2.2 Keterkaitan RPJMN 2025-2029 dengan RPJPN.....	2-31
Gambar 2.3 Ilustrasi Kerangka Pikir Pembangunan manusia.....	2-32
Gambar 2.4 Arah Kebijakan Kemenkes 2025-2029	2-33
Gambar 3.1 Pencapaian Indikator AHH dan Stunting	3-6

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

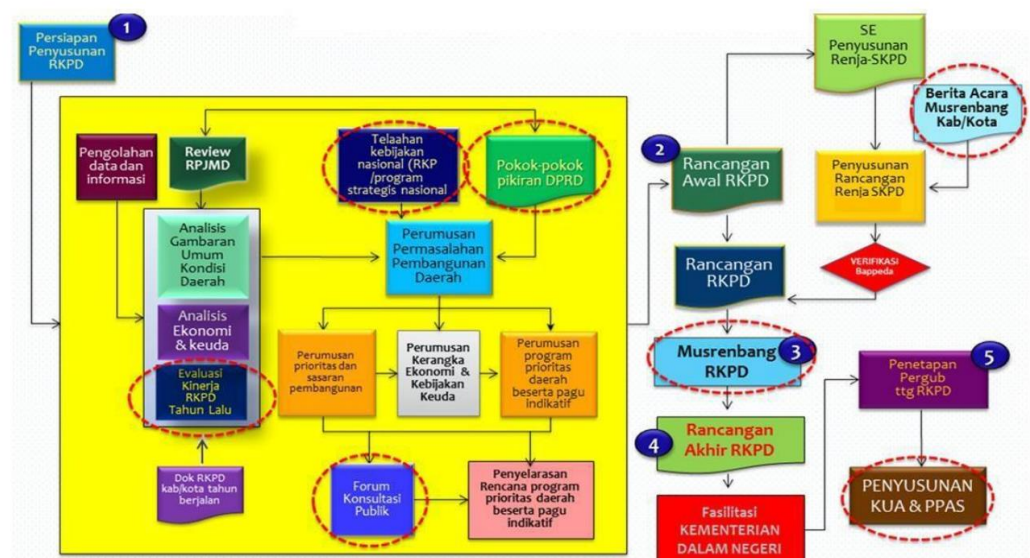
Salah satu cara untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan melihat capaian IPM. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan IPM yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah.

Tahun 2023, IPM Nasional menunjukkan angka 74,39 sedangkan DIY telah mencapai 81,09, tahun 2024 IPM DIY mencapai 81,62 (kategori sangat tinggi) lebih tinggi dari pada IPM Nasional yang mencapai 75,02. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. Tahun 2024 AHH DIY mencapai 75,36 (*Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dataku Bappeda DIY, 2024*).

Visi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam RPJMD DIY 2022-2027 adalah Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan perangkat daerah dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
2. Daerah (RKPD) kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
3. Renja memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh pengampu program/kegiatan (Urusan) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD).
4. Renja merupakan acuan Kepala SKPD dan TAPD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.

Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja Renstra sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.



Gambar 1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD DIY

Sumber: RKPD DIY 2026

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih

panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan DIY khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya untuk periode 1 tahun. Dokumen Renja Dinas Kesehatan DIY memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, dan kelompok indikator kinerja beserta rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar hukum yang mendasari penyusunan renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 1.2.5. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006

- tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 1.2.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 - 1.2.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 1.2.10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 - 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 1.2.12. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 1.2.13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1.2.14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - 1.2.15. Kepmendagri No 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.2.16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
 - 1.2.17. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan

Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa
Grhasia Pada Dinas Kesehatan

- 1.2.18. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan;
- 1.2.19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027
- 1.2.20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027
- 1.2.21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender
- 1.2.22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
- 1.2.23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan dokumen resmi yang memuat program dan kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2026. Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2026 ini adalah sebagai terjemahan dari Renstra Dinas Kesehatan DIY 2023-2027, yang selanjutnya disusun tahunan, khususnya untuk periode tahun 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan 2026 juga menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2026 ini adalah agar perencanaan pembangunan kesehatan di DIY tahun 2026, lebih terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan DIY Tahun 2026 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2025.

Keberhasilan Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024 dapat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan DIY 2023 – 2027. Renstra Dinas Kesehatan DIY merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan DIY dengan berbasiskan data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Dari keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen rencana strategis yang memuat visi dan misi Gubernur DIY, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Selanjutnya renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD atau Renja OPD seperti saat ini melalui penyusunan Renja 2026. Namun demikian, Renstra telah mengalami perubahan dengan mengakomodasi pada perubahan organisasi mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Secara rinci gambaran pencapaian indikator keberhasilan Dinkes DIY dapat dilihat pada tabel berikut 2.1 berikut:

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,36	0,39	0,42	0,35	0,396	n/a
2	Kategori Reformasi Birokrasi perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	n/a

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Lembar :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Capaian	1. Persentase fasyankes terakreditasi	52,84	52,84	54,32	71,64	131,885125	75	n/a	100
		2. Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC	84	86,9	85	85,13	100,152941	86	n/a	100
		3. Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)	60	43,54	62	62,91	101,467742	63	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

MASYARAKAT (1.02.02)		4. Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria	100	100	100	100	100	100	n/a	100
		5. Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur	76	56,9	77	78,13	101,467 532	78	n/a	100
		6. Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur	76	64,8	77	84,2	109,350 649	78	n/a	100
		7. Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara	14	5,1	15	15,93	106,2	16	n/a	100
		8. Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas	25	20,8	30	36,61	122,033 333	35	n/a	100
		9. Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar	71	93,4	72	91,1	126,527 778	73	n/a	100
		10. Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)	6,5	7,6	6,4	6,4	100	6,3	n/a	100
		11. Presentase Remaja Putri Anemia	22,2	24,4	21,5	20,74	103,534 884	20,8	n/a	100
		12. Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta	100	100	100	100	100	100	n/a	100
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (02.02.101)	Keluaran	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	5	3	3	100	5	n/a	100
		Penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	4	4				2	n/a	100
		Pembangunan fasilitas kesehatan, pengembangan rumah sakit, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan alat kesehatan/alat laboratorium/penunjang medik.	19	19					n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.02)	Keluaran	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	n/a					n/a	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.02)	Capaian	Persentase pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	0	n/a					n/a	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.02)	Keluaran	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	n/a					n/a	
Pengembangan Rumah Sakit (02.02.1.01.03)	Capaian	Terwujudnya pengembangan rumah sakit	56,66	90,93					n/a	100
Pengembangan Rumah Sakit (02.02.1.01.03)	Keluaran	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	n/a					n/a	100
Pengembangan Rumah Sakit (02.02.1.01.03)	Keluaran	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	1	n/a					n/a	100
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (02.02.1.01.10)	Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0	n/a					n/a	100
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	0	n/a					n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Fasilitas Layanan Kesehatan (02.02.1.01.10)		Layanan Kesehatan yang Disediakan								
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (02.02.1.01.10) BLKK	Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0	n/a	2	2	100	13	n/a	100
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (02.02.1.01.11)	Keluaran	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	n/a					n/a	100
Pengadaan Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (02.02.1.01.12)	Keluaran	Jumlah Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	n/a					n/a	
Pengadaan dan pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (02.02.1.01.15)	Keluaran	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	17	18					n/a	100
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.21)	Keluaran	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	5	3	3	100	5	n/a	100
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinkes) (02.02.1.01.22)	Keluaran	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang	1	1				2	n/a	100
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta	Keluaran	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas	2	2					n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Facilities Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.22)		Kesehatan Lainnya yang Disediakan								
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.22)	Keluaran	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1	1					n/a	100
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.22) BLKK	Keluaran	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi (02.02.1.01.0013) BLKK					1	1	100	8	n/a	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (02.02.102)	Keluaran	1. Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	100	100	100	100	100	100	n/a	100
		2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	57	57	33	33	100	65	n/a	100
		3. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	1	1	100	3	n/a	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (02.02.1.02.01)	Keluaran	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			438	438	100	1000	n/a	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (02.02.1.02.02)	Keluaran	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28115	407	28215	28215	100	28315	n/a	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (02.02.1.02.03)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	9	6	6	6	100	6	n/a	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (02.02.1.02.04)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5	5	1	1	100	1	n/a	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (02.02.1.02.05)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut	3	3	1	1	100	1	n/a	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (02.02.1.02.06)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8	8	3	3	100	3	n/a	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (02.02.1.02.07)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9	2	1	1	100	1	n/a	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (02.02.1.02.08)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	3	4	4	100	4	n/a	100
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (2.02.1.02.09)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6	2	1	1	100	2	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (2.02.1.02.11)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8	10	8	8	100	8	n/a	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (2.02.1.02.13)	Keluaran	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	0	1	1	1	100	1	n/a	100
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (2.02.1.02.16)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	8	1	1	100	1	n/a	100
Pengelolaan Surveilans Kesehatan (2.02.1.02.17)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	4	4	4	100	1	n/a	100
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (2.02.1.02.19)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2	2	1	1	100	4	n/a	100
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (2.02.1.02.23)	Keluaran	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	6	1	1	100	3	n/a	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan keluarga (2.02.1.02.24)	Keluaran	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	815000	814985	814300	814300	100	832000	n/a	100
Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Grhasia) (2.02.1.02.22)	Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	n/a					n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Respira) (2.02.1.02.22)	Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2	n/a					n/a	100
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (02.02.1.03)	Keluaran	Jenis dokumen pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	3	3	3	3	100	3	n/a	100
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (2.02.1.03.01)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	3	3	3	100	3	n/a	100
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (02.02.1.04)	Keluaran	Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) dan rumah sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	230	350	311	311	100	100	n/a	100
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (2.02.1.04.03)	Keluaran	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	230	350	311	311	100	310	n/a	100
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1.02.02.1.04.0001)	Keluaran	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	n/a	n/a	32	32	100	32	n/a	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (1.02.03)	Capaian	1. Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	52,67	53,43	55,73	62,97	112,991 208	59,54	n/a	100
		2. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	86	n/a	87	90,52	104,045 977	88	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (02.03.1.01)	Keluaran	Terlaksananya peningkatan upaya pemenuhan dan pemerataan SDM	20	20				87,86	n/a	100
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (2.03.1.01.01)	Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28128	-	28228	28228	100	28328	n/a	100
1.02.03.1.01.0002 - Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi						5	n/a	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (02.03.1.02)	Keluaran	1. Jumlah SDM yang mendapatkan pengembangan kompetensi	1300	2449				88	n/a	100
		2. Persentase Pelatihan Tenaga Kesehatan yang terakreditasi	100	100	100	100	100	99,57	n/a	100
		3. Terlaksananya peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	22/79 x 100% = 27,85%	n/a					n/a	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (2.03.1.02.02)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	2	1	1	100	2	n/a	100
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Bapelkes) (2.03.1.02.01)	Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1292	225	710	740	104,225 352	880	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (1.02.04)	Capaian	Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	65,6	66,1	75,47	82,97	109,937 724	86,1	n/a	100
		Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi	64	48,38	88	92,59	105,215 909	92	n/a	100
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cadang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (02.04.1.01)	Keluaran	Terwujudnya peningkatan upaya pengelolaan data, pengendalian, dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	65,6	66,1	84,4	84,4	100	100	n/a	100
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (2.04.1.01.01)	Capaian	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100	100	100	100	100	44	n/a	100
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (1.02.04.1.01.02)	Keluaran	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	n/a	-	n/a	n/a	n/a		n/a	100
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (Farmakmin) (02.04.1.02)	Keluaran	Terwujudnya peningkatan upaya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional	64	48,38	100	100	100	100	n/a	100
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat	Keluaran	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	25	-	1	1	100	8	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Tradisional (2.04.1.02.01)										
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan UKOT Berbasis Elektronik (2.04.1.02.02)	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	n/a	-	n/a	n/a	n/a		n/a	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (1.02.05)	Capaian	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	100	100	100	100	100	n/a	100
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1.02.05.1.01)	Keluaran	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	3	3	2	2	100	100	n/a	100
Peningkatan Upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1.02.05.1.01.01)	Keluaran	Jumlah dokumen hasil advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	5	2	2	2	100	3	n/a	100
PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG (1.03.13)	Capaian	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	n/a	-					n/a	100
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Keluaran	Jumlah fasilitas pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia	n/a	-					n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Kasultanan dan Kadipaten (1.03.13.5.02)										
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi (1.03.13.5.02.08)	Keluaran	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Merapi	n/a	-					n/a	100
Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang (1.03.13.5.04)	Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia	n/a	-					n/a	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (1.03.13.5.04.01)	Keluaran	Jumlah dokumen kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	n/a	-					n/a	100
PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (2.22.08)	Capaian	Persentase pembinaan kesehatan tradisional	100	100	100	100	100	100	n/a	100
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (22.08.5.08)	Keluaran	Fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas dilakukan pengembangan kesehatan tradisional	5	5	1	1	100	100	n/a	100
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional (22.08.5.08.04)	Keluaran	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	85	4	1	1	100	1	n/a	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.22.08)	Capaian	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,89	n/a	89,06	92,03	103,33	89,21	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY	21	n/a	4	4	100	100	n/a	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (01.1.01.01)	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	n/a	4	4	100	4	n/a	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (01.1.01.04)	Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	n/a	1	1	100	2	n/a	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01.1.01.07)	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	n/a	1	1	100	2	n/a	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	752	n/a	224	224	100	219	n/a	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28	n/a	12	12	100	12	n/a	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	26	n/a	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes) (01.1.02.01)	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260	n/a	224	224	100	219	n/a	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Respira) (01.1.02.01)	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171	n/a	175	175	100	178	n/a	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Grhasia) (01.1.02.01)	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	321	n/a					n/a	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	n/a	12	12	100	12	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

(Dinkes) (01.1.02.03)										
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BLKK) (01.1.02.03)	Keluaran	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	n/a	4	4	100%	4	n/a	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bapel Jamkesos) (01.1.02.03)	Keluaran	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	n/a	4	4	100	4	n/a	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bapelkes) (01.1.02.03)	Keluaran	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4	n/a	4	4	100	4	n/a	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Respira) (01.1.02.03)	Keluaran	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0	n/a					n/a	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinkes) (01.1.02.04)	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	n/a	1	1	100	1	n/a	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Dinkes) (01.1.02.07)	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	25	n/a	12	12	100	25	n/a	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keluaran	1) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1) 1	1) 5	1	1	100	1	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

		2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,	2) 5	2) 25	1	1	100	1	n/a	100
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.02)	Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	5	1	1	100		n/a	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (01.1.03.06)	Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5	1	1	100	1	n/a	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BLKK) (01.1.03.06)	Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5	1	1	100%	1	n/a	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapel Jamkesos) (01.1.03.06)	Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5	1	1	100	1	n/a	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapelkes) (01.1.03.06)	Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5	1	1	100	1	n/a	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Respira) (01.1.03.06)	Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5	1	1	100	1	n/a	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	-	n/a	n/a	n/a		n/a	100
Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (01.1.05.09)	Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	-	n/a	n/a	n/a		n/a	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100	100	100	100	100	1	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

		Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, dan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	100	100	100	100	1	n/a	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	100	100	1	n/a	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.1.06.01)	Keluaran	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapel Jamkesos) (01.1.06.01)	Keluaran	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapelkes) (01.1.06.01)	Keluaran	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	-	-	-	-	n/a	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.1.06.02)	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapel Jamkesos) (01.1.06.02)	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapelkes) (01.1.06.02)	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	-	-	-	-	n/a	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (01.1.06.03)	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapel Jamkesos) (01.1.06.03)	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BLKK) (01.1.06.03)	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapelkes) (01.1.06.03)	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	-	-	-	-	n/a	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (01.1.06.04)	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BLKK) (01.1.06.04)	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapel Jamkesos) (01.1.06.04)	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	-	-	-	-	n/a	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapelkes) (01.1.06.04)	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	-	-	-	-	n/a	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (01.1.06.05)	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapel Jamkesos) (01.1.06.05)	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapelkes) (01.1.06.05)	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100	-	n/a	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (01.1.06.06)	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bapel Jamkesos) (01.1.06.06)	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	-	-	-	-	-	n/a	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bapelkes) (01.1.06.06)	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	-	-	-	-	-	n/a	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (01.1.06.09)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapel Jamkesos) (01.1.06.09)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	1	2	2	100	2	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapelkes) (01.1.06.09)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	1	-	-	-	-	n/a	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (01.1.06.11)	Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Jamkesos) (01.1.06.11)	Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	-	-	-	-	n/a	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.1.07)	Keluaran	1) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	1) 103	103	100	100	100		n/a	100
		2) Pengadaan mebel	2) 2	2	n/a	n/a	n/a		n/a	100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (01.1.07.02)	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	-	n/a	n/a	n/a		n/a	100
Pengadaan Mebel (Dinkes) (01.1.07.05)	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	-	n/a	n/a	n/a		n/a	100
Pengadaan Mebel (Respira) (01.1.07.05)	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
Pengadaan Mebel (BLKK) (01.1.07.05)	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (BLKK) (01.1.07.04)	Keluaran	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes) (01.1.07.06)	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	7	1	1	100		n/a	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BLKK) (01.1.07.06)	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes) (01.1.07.06)	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	12	-	-	-	-	n/a	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Respira) (01.1.07.06)	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	10	10	100	1	n/a	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapel Jamkesos) (01.1.07.06)	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	8	n/a	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinkes) (01.1.07.09)	Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	2	2	100		n/a	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) (01.1.07.09)	Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (01.1.07.10)	Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	-	n/a	n/a	n/a		n/a	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	25	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Bangunan Lainnya (BLKK) (01.1.07.10)		Bangunan Lainnya yang Disediakan								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Respira) (01.1.07.10)	Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang perkantoran Dinkes DIY	3	3	1	1	100	1	n/a	#REF!
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinkes) (01.1.08.01)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bapelkes) (01.1.08.01)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	-	-	-	-	n/a	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinkes) (01.1.08.02)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BLKK) (01.1.08.02)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	100	3	n/a	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapel Jamkesos) (01.1.08.02)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1	3	3	100	3	n/a	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

(Bapelkes) (01.1.08.02)										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinkes) (01.1.08.04)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BLKK) (01.1.08.04)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	3	4	4	100	2	n/a	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapel Jamkesos) (01.1.08.04)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1	4	4	100	4	n/a	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapelkes) (01.1.08.04)	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	84	84				1	n/a	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinkes) (01.1.09.02)	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	50	6	6	100	2	n/a	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapel	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	7	6	6	100	6	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Jamkesos) (01.1.09.02)										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapelkes) (01.1.09.02)	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	10	10	100	-	n/a	100
Pemeliharaan Mebel (Bapelkes) (01.1.09.05)	Keluaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	2	-	-	-	-	n/a	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes) (01.1.09.06)	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1				1	n/a	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes) (01.1.09.06)	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	17	4	4	100	-	n/a	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes) (01.1.09.06)	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	17	13	13	100	47	n/a	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinkes) (01.1.09.09)	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1					n/a	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos) (01.1.09.09)	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	4	4	100	4	n/a	100

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2025

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapelkes) (01.1.09.09)	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	-	n/a	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) (01.1.09.10)	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos) (01.1.09.10)	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	13	13	100	22	n/a	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapelkes) (01.1.09.10)	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	52	27	27	100	-	n/a	100
Peningkatan Pelayanan BLUD	Keluaran	BLUD yang meningkat pelayanannya	4	4					n/a	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BLKK) (01.1.10.01)	Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Bapelkes) (01.1.10.01)	Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Grhasia) (01.1.10.01)	Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	1			n/a	100

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Respira) (01.1.10.01)	Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	1	100	1	n/a	100
---	----------	--	---	---	---	---	-----	---	-----	-----

Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah Provinsi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	583	583	100	583	583	100	100%	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	157490	157490	100	157490	157490	100	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Berdasarkan Hasil Pendataan Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024 yang *diupload* pada Aplikasi Pelaporan eSPM

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

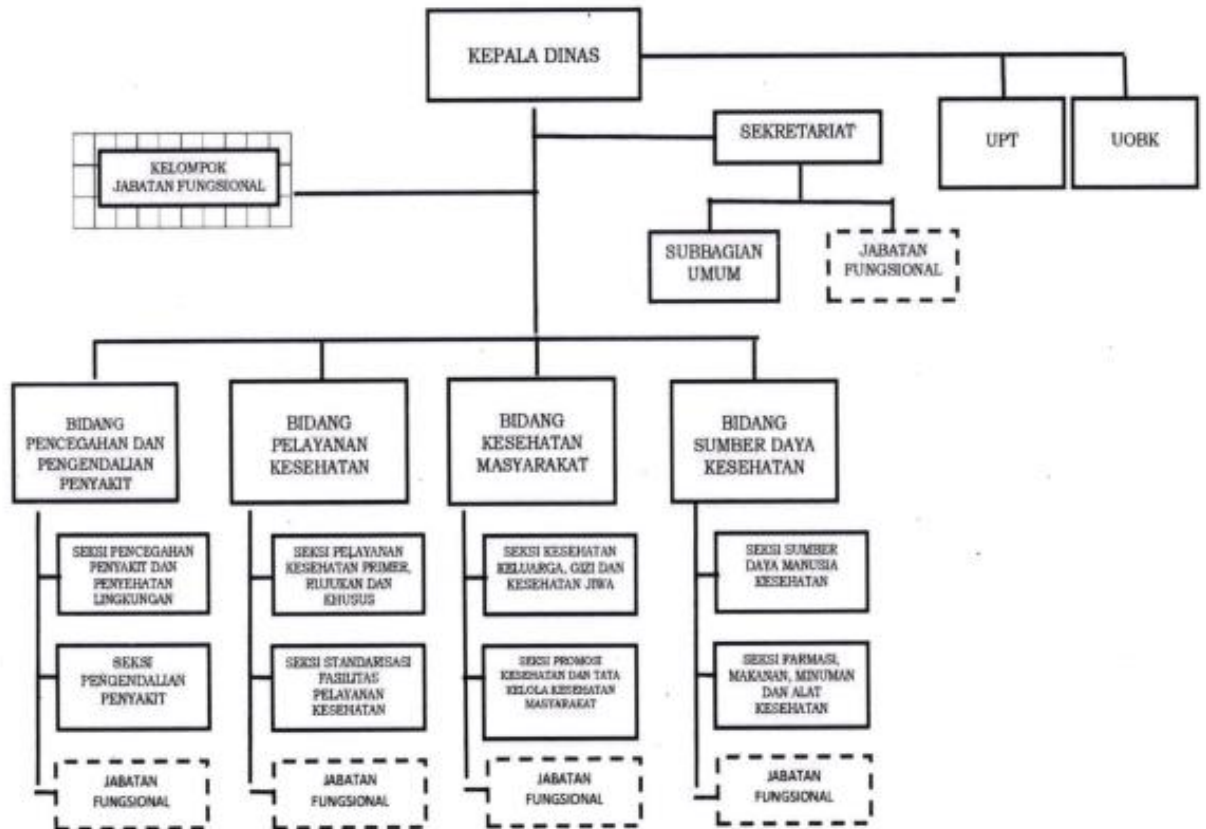
Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, tugas Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan DIY sesuai Bab III Pasal 5, adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- e. penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- f. pengelolaan sumber daya kesehatan;
- g. pengembangan upaya kesehatan tradisional;
- h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
- i. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
- j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan DIY memiliki 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan. UPT tersebut adalah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Balai Pelatihan Kesehatan, dan Badan

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial. Selain itu terdapat Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan yaitu RS Jiwa Ghrasia dan RS Paru Respira sebagaimana tertuang dalam Pergub nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan

Analisis kinerja pelayanan Dinkes DIY dapat dilihat di tabel 2.2. berikut:

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

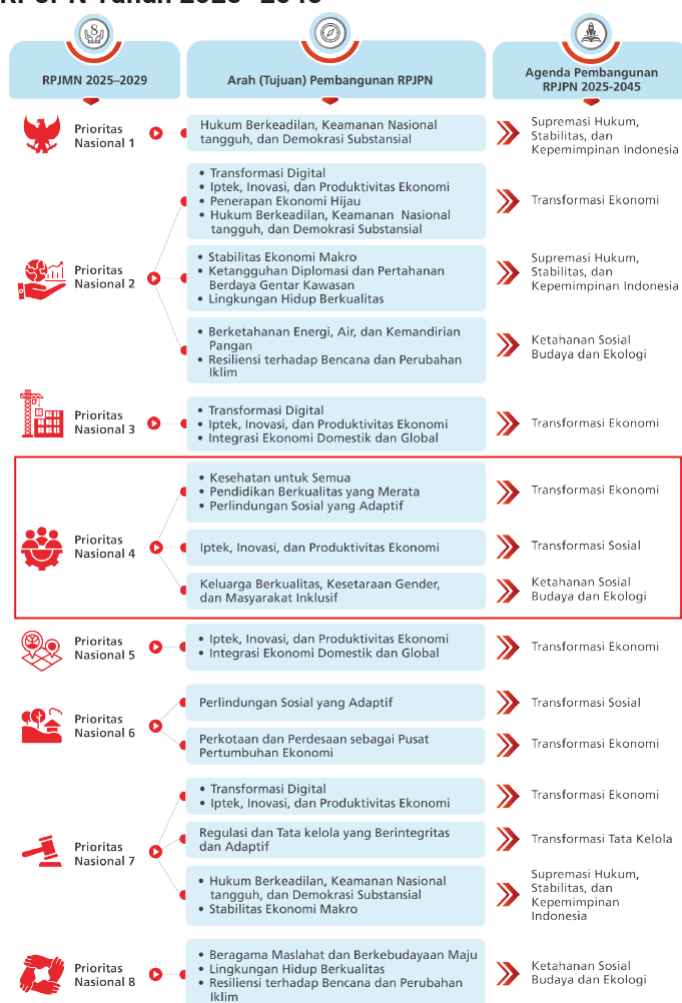
NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2024	2025	2026	
1	Indeks Keluarga Sehat			0,33	0,36	0,39	0,42	0,35	0,396	n/a	0,396	n/a	n/a	2025 belum dapat diketahui, Sehingga tahun 2026 belum dapat diproyeksikan
2	Kategori Reformasi Birokrasi perangkat Daerah			A	A	A	A	A	A	n/a	A	n/a	n/a	2025 belum dapat diketahui, Sehingga tahun 2026 belum dapat diproyeksikan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Kesehatan terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Upaya ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, khususnya dalam pilar Transformasi Sosial yang mengusung misi “Kesehatan untuk Semua”. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2025-2029 fokus pada mewujudkan “Indonesia Sehat” dan mendukung “Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan sistem kesehatan yang tangguh, dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Salah satu fokus arah Kebijakan RPJPN 2025-2025 tahap I (2025-2029) yaitu Transformasi Sosial Penuntasan Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Asta Cita ke 4: Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing adalah modal utama menuju Visi Indonesia Emas 2045. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor, di sektor Kesehatan program prioritas tersebut adalah Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS dan penyediaan obat untuk rakyat.

Keterkaitan RPJMN Tahun 2025–2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045



Sumber : RPJMN 2025-2029

Strategi prioritas Pembangunan RPJMN 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan Tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Meningkatkan kualitas SDM diperlukan transformasi Pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup untuk Masyarakat yang lebih Sejahtera, adil, dan kohesif. Tiga pilar Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada Pemenuhan layanan dasar, Pembangunan modal manusia, dan Pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.

Pembangunan berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta memampukan manusia (*human capabilities*) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar dan memanfaatkan modal sosial budaya



Gambar ilustrasi kerangka pikir pembangunan manusia

Sumber : RPJMN 2025-2029

Sebagai ukuran keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka digunakan Indeks Modal Manusia, yang di dalamnya terdapat komponen Angka kelangsungan hidup usia anak (<5tahun), angka kelangsungan hidup usia dewasa produktif (16-60 tahun), dan prevalensi stunting. Kegiatan prioritas utama RPJMN tahun 2025-2029 di sektor Kesehatan adalah Penurunan kematian ibu dan anak, pencegahan dan penurunan stunting, Penyelenggaraan pemeriksaan Kesehatan gratis, Penuntasan TBC, Pemberian makan bergizi untuk siswa, Santri, Ibu hamil, Ibu Menyusui, dan Balita, Penguatan ekosistem pendukung Pemberian Makan Bergizi, Eliminasi Penyakit Kusta dan Schistosomiasis, Investasi pelayanan Kesehatan primer, Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kab/Kota dan pengembangan pelayanan Kesehatan bergerak dan daerah sulit akses, serta produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan.

Visi Kementerian Kesehatan “Masyarakat yang sehat dan produktif untuk Indonesia Emas 2045” yang dijabarkan ke dalam 4 indikator sasaran strategis :

1. Usia Harapan Hidup
2. Usia Harapan Hidup Sehat
3. UHC
4. Total Fertility Rate

Arah Kebijakan bidang Kesehatan sesuai dengan asta cita point 4 berdasarkan RPJMN 2025-2029 :

1. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
2. Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi

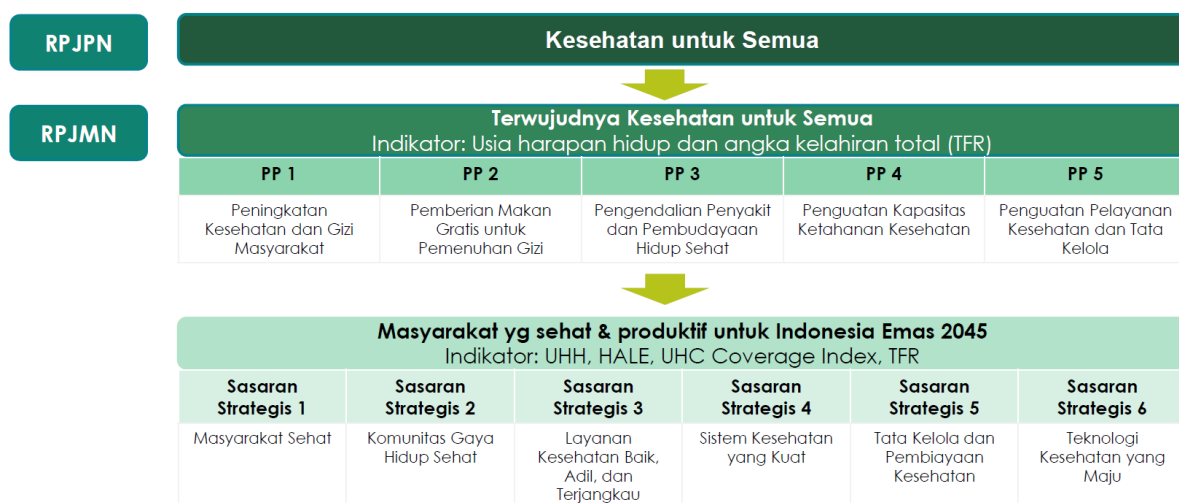
3. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
4. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
5. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dirumuskan dengan Menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di setiap kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi sistem kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat Kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Strategi Arah kebijakan Kementerian Kesehatan yaitu:

1. Penguatan transformasi layanan primer melalui promosi kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan, untuk mewujudkan Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Penguatan transformasi layanan primer melalui kolaborasi pentahelix, untuk peningkatan implementasi budaya gaya hidup sehat
3. Penguatan transformasi layanan primer dan lanjutan serta SDM kesehatan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan
4. Penguatan transformasi sistem ketahanan kesehatan untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman Kesehatan
5. Penguatan transformasi pendanaan kesehatan dan Tata Kelola pemerintahan sektor kesehatan untuk mencapai target pembangunan Kesehatan
6. Penguatan Transformasi teknologi kesehatan untuk meningkatkan inovasi layanan kesehatan yang efisien, terjangkau dan inklusif
7. Peningkatan Transformasi internal Kementerian Kesehatan untuk mendukung terwujudnya Transformasi Kesehatan

Secara Ringkas dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut:



Gambar Arah Kebijakan Kemenkes 2025-2029 sebagai penerjemah RPJMN 2025-2029

Permasalahan- permasalahan pokok urusan kesehatan dalam perencanaan tahun 2026 diantaranya yakni :

- a. *multiple burden disease* dari penyakit tidak menular *degenerative*. Kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat yang ditunjukkan dengan angka prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut data SKI tahun 2023 capaian prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular diantaranya prevalensi Diabetes Melitus di DIY 2,9% sementara angka Nasional 1,7%, untuk Hipertensi berdasarkan hasil pengukuran di DIY 30,4% dan angka nasional 29,2%, terkait kasus kanker di DIY 3,6 % dan Nasional 1,2%. Diperlukan peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat. Tahun 2024 di DIY Jumlah estimasi keseluruhan penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun pada tahun 2024 adalah sejumlah 180.389 penderita, jumlah penderita Diabetes Melitus tahun 2024 mencapai 108.319 penderita, Jumlah penemuan kasus Diare tahun 2024 di semua umur sejumlah 57.386 kasus, sedangkan untuk kasus baru Kanker di DIY tahun 2024 mencapai 4.141 kasus.
- b. Belum optimalnya fasilitas layanan kesehatan dalam antisipasi dan penanganan KLB dan bencana. Dalam pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan meliputi : layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan. Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, diperlukan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan Tim Gerak Cepat.
- c. Penyakit menular infeksi dan infeksi baru (*re-emerging and new emerging disease*) serta potensi kejadian luar biasa. Jumlah kasus TB yang ditemukan tahun 2024 mencapai 6811 kasus, Jumlah kasus baru HIV mencapai 886 orang dan AIDS 136 orang, Jumlah kasus DBD tahun 2024 mencapai 4037 kasus, dan penemuan kasus pneumonia balita di DIY tahun 2024 sebanyak 86 %, angka tersebut mengalami kenaikan 23% dari tahun sebelumnya.
- d. Angka Stunting masih cukup tinggi. Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus. Sesuai dengan Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)_c untuk tahun 2025 ditentukan target pada angka 18,8 dan tahun 2029 14,2. Pada tahun 2024, kasus stunting di DIY mengalami penurunan sebesar 0,6% sehingga menjadi 17,4% (Survei Status Gizi Indonesia, 2025).
- e. Jumlah kasus kematian ibu masih belum bisa ditekan. Pada tahun 2023 kematian ibu terjadi sebesar 22 kasus(data Dinkes DIY). Penyebab kematian ibu pada tahun 2023 di DIY disebabkan oleh Cerebrovaskuler 1, jantung dan pembuluh darah 1, pendarahan 10, gangguan hipertensi 7,

perdarahan 8, covid-19 sebanyak 1 kasus dan infeksi 4. Tahun 2024 kematian ibu terjadi sebanyak 25 kasus yang disebabkan oleh Perdarahan 2 kasus, Gangguan Hipertensi 10, Infeksi 1, Kelainan jantung dan pembuluh darah 6 kasus, dan lain-lainnya 6 kasus.

- f. Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 jumlah Balita Gizi Buruk di DIY mencapai 0,16%, sedangkan tahun 2024 mencapai 0,17% (Sumber : Dinkes DIY). Angka menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi balita gizi kurang di DIY belum tercapai secara maksimal.
- g. Angka kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Pada tahun 2022, kasus kematian bayi sebanyak 303 kasus. Tahun 2023 kematian bayi di DIY sebesar 272 kasus, Dimana kasus tertinggi dari Kabupaten Bantul sebesar 81 kasus. Tahun 2024 kematian bayi terjadi sebanyak 330 kasus.
- h. Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

Strategi untuk mengatasi permasalahan di atas diantaranya adalah:

1. Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat. Strategi yang perlu diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yaitu : a) pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat. Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveillans berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin.
2. Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung stunting seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat, serta melalui penguatan pelayanan kesehatan anak terpadu.
3. Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi

kehamilan dan persalinan di fasilitas Kesehatan, serta pemenuhan standar mutu dipelayanan fasilitas kesehatan

4. Dalam pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan meliputi : layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan. Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, diperlukan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan Tim Gerak Cepat.
5. Upaya yang perlu dilakukan yaitu pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar layanan dan penguatan layanan kesehatan terutama di daerah-daerah yang akan menjadi pusat pertumbuhan dan wilayah perbatasan seperti di daerah selatan DIY dan jalur perbukitan menoreh sebagai antisipasi terjadinya permasalahan-permasalahan kesehatan di daerah tersebut.

Selanjutnya Dinas Kesehatan DIY memandang perlu untuk melakukan langkah- langkah responsif terhadap isu-isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari langkah responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam usulan program/kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2026.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD telah sesuai dengan kebutuhan, tetapi dari segi anggaran yang direncanakan, serta indikator keluaran dan hasil, masih perlu dilakukan perubahan. Perubahan rencana anggaran ini dibutuhkan karena terdapat perubahan kebutuhan menyesuaikan kondisi masyarakat sasaran serta kebijakan. Review ini membantu memetakan selisih antara kebutuhan dengan rancangan awal RKPD.

Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
DINAS KESEHATAN				47.118.787.051,00			47.118.787.051,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				46.659.158.051,00			46.659.158.051,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				46.659.158.051,00			46.659.158.051,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DIY	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	37.739.830.001,00	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	37.739.830.001,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY	100 %	16.132.000,00	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY	100 %	16.132.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.680.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.680.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.400.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.400.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.052.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.052.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	34.202.038.201,00	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	34.202.038.201,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	247 Orang/ Bulan	34.183.105.601,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	247 Orang/ Bulan	34.183.105.601,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.305.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.305.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.887.600,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.887.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	5.740.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	5.740.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIY	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	24.332.000,00	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	24.332.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.200.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.200.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.132.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.132.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DIY	SDM Dinkes meningkat pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan terbaru	30 Orang	3.131.800,00	SDM Dinkes meningkat pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan terbaru	30 Orang	3.131.800,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	3.131.800,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	3.131.800,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	322.903.400,00	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	322.903.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.655.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.655.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.506.400,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.506.400,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.154.500,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.154.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	240.637.500,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	240.637.500,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	350.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	350.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIY	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	306.500.000,00	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	306.500.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	46.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	46.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.500.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.500.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	2.299.312.080,00	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	2.299.312.080,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	910.923.200,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	910.923.200,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.388.388.880,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.388.388.880,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	565.480.520,00	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	565.480.520,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	63.257.300,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	63.257.300,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	326.019.920,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	326.019.920,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	96.203.300,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	96.203.300,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DIY	Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase fasyankes terakreditasi Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Remaja Putri Anemia Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Persentase	64 % 62.22 % 17 % 100 % 20.1 % 6.2 % 79 % 74 % 40 % 87 %	8.236.074.800,00	Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase fasyankes terakreditasi Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Remaja Putri Anemia Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC	64 % 62.22 % 17 % 100 % 20.1 % 6.2 % 79 % 74 % 40 % 87 %	8.236.074.800,00

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
		Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	DIY	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	354.789.000,00	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	354.789.000,00
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	DIY	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Dokumen	345.579.000,00	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Dokumen	345.579.000,00
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DIY	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	9.210.000,00	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	9.210.000,00

20

	melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase KN Lengkap Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase RS memenuhi standar kredentialing Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam		mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase RS memenuhi standar kredentialing Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam		
--	---	--	--	--	--

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	DIY	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1200 Orang	826.180.000,00	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1200 Orang	826.180.000,00
	DIY						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	DIY	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66422 Orang	890.005.800,00	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66422 Orang	890.005.800,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	231.871.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	231.871.500,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	123.106.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	123.106.500,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	36.350.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	36.350.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	185.352.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	185.352.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	151.578.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	151.578.500,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1.467.010.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1.467.010.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	392.503.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	392.503.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	2.139.763.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	2.139.763.500,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	113.222.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	113.222.000,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	33.771.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	33.771.500,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	50.752.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	50.752.000,00
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4 Dokumen	553.344.700,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4 Dokumen	553.344.700,00
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	DIY	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6 Unit	494.950.800,00	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6 Unit	494.950.800,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	DIY	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	832000 Keluarga	24.161.000,00	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	832000 Keluarga	24.161.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	DIY	Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	100 %	72.510.000,00	Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	100 %	72.510.000,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	72.510.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	72.510.000,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	DIY	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan	100 %	94.853.000,00	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan	100 %	94.853.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DIY	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	32 Unit	29.233.000,00	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	32 Unit	29.233.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DIY	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	310 Unit	65.620.000,00	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	310 Unit	65.620.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DIY	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63.35 % 89 %	569.065.250,00	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63.35 % 89 %	569.065.250,00
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	DIY	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	88.19 %	191.417.500,00	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	88.19 %	191.417.500,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	DIY	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28428 Orang	161.477.500,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28428 Orang	161.477.500,00
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	DIY	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	8 Orang	29.940.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	8 Orang	29.940.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	DIY	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	99.66 % 89 %	377.647.750,00	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	99.66 % 89 %	377.647.750,00
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	DIY	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1353 Orang	285.050.000,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1353 Orang	285.050.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen	92.597.750,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen	92.597.750,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DIY	Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	95 % 87,7 %	39.136.000,00	Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	95 % 87,7 %	39.136.000,00
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang	DIY	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	100 %	28.176.500,00	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan	100 %	28.176.500,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		terhadap ketentuan perizinan			dan diawasi terhadap ketentuan perizinan		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	DIY	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	46 Sarana	28.176.500,00	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	46 Sarana	28.176.500,00
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	DIY	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100 %	10.959.500,00	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100 %	10.959.500,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	DIY	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	10.959.500,00	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	10.959.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DIY	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	75.052.000,00	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	75.052.000,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	DIY	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	100 %	75.052.000,00	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	100 %	75.052.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	75.052.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	75.052.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DIY			459.629.000,00			459.629.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DIY			459.629.000,00			459.629.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	DIY	Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	40 %	459.629.000,00	Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	40 %	459.629.000,00
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	DIY	Pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas	100 %	459.629.000,00	Pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas	100 %	459.629.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	DIY	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	1 Unit	459.629.000,00	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	1 Unit	459.629.000,00
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	DIY			14.703.677.150,00			14.703.677.150,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DIY			14.703.677.150,00			14.703.677.150,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DIY			14.703.677.150,00			14.703.677.150,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DIY	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	9.893.372.600,00	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	9.893.372.600,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	10.730.000,00	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	10.730.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	10.730.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	10.730.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIY	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	14.750.000,00	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	14.750.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14.750.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14.750.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 % 1 Paket	63.180.000,00	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 % 1 Paket	63.180.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DIY	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.180.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.180.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIY	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	48.800.000,00	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	48.800.000,00
Pengadaan Mebel	DIY	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	48.800.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	48.800.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.864.232.600,00	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.864.232.600,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	859.460.600,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	859.460.600,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.004.772.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.004.772.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	91.680.000,00	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	91.680.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91.680.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91.680.000,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	DIY	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD	100 %	7.800.000.000,00	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD	100 %	7.800.000.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	DIY	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.800.000.000,00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.800.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DIY	Persentase fasyankes terakreditasi	62,22 %	4.810.304.550,00	Persentase fasyankes terakreditasi	62,22 %	4.810.304.550,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	DIY	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	4.810.304.550,00	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	4.810.304.550,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	DIY	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	1.849.780.550,00	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	1.849.780.550,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	DIY	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	620.524.000,00	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	620.524.000,00
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DIY	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	2.340.000.000,00	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	2.340.000.000,00
BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	DIY			52.222.476.600,00			52.222.476.600,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DIY			52.222.476.600,00			52.222.476.600,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DIY			52.222.476.600,00			52.222.476.600,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DIY	-	-	1.318.976.900,00	-	-	1.318.976.900,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	-	-	7.470.000,00	-	-	7.470.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	7.470.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	7.470.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIY	-	-	11.660.000,00	-	-	11.660.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.660.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.660.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	-	-	146.582.400,00	-	-	146.582.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.425.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.425.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.755.900,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.755.900,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.373.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.373.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.628.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.628.500,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	42.400.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	42.400.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIY	-	-	58.360.000,00	-	-	58.360.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	58.360.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	58.360.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	-	-	709.316.000,00	-	-	709.316.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	115.040.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	115.040.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	594.276.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	594.276.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	-	-	385.588.500,00	-	-	385.588.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	61.404.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	61.404.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	48.050.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	48.050.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	256.457.500,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	256.457.500,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	19.677.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	19.677.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DIY	-	-	50.903.499.700,00	-	-	50.903.499.700,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	DIY	-	-	50.903.499.700,00	-	-	50.903.499.700,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	50.903.499.700,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	50.903.499.700,00
BALAI PELATIHAN KESEHATAN	DIY			6.688.653.000,00			6.688.653.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DIY			6.688.653.000,00			6.688.653.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DIY			6.688.653.000,00			6.688.653.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DIY	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	6.466.486.200,00	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	6.466.486.200,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	11.556.000,00	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	11.556.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	11.556.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	11.556.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIY	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	12.876.000,00	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	12.876.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.876.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.876.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	117.062.200,00	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	117.062.200,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.724.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.724.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.672.200,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.672.200,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.881.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.881.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.785.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.785.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	16.480.000,00	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	16.480.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.480.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.480.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.544.065.000,00	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.544.065.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	329.225.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	329.225.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.209.840.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.209.840.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	372.147.000,00	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	372.147.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	193.526.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	193.526.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	40.301.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	40.301.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	38.320.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	38.320.000,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	DIY	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.392.300.000,00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.392.300.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	DIY	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.392.300.000,00	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.392.300.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lo kas i	RKPD			Analisis Kebutuhan		
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3		4	8	9	4	8	9
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DIY	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan Terpenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	89 % 63,35 %	222.166.800,00	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan Terpenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	89 % 63,35 %	222.166.800,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	DIY	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	99,66 % 89 %	222.166.800,00	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	99,66 % 89 %	222.166.800,00
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	DIY	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1080 Orang	222.166.800,00	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1080 Orang	222.166.800,00
				120.733.593.801,00			120.733.593.801,00

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada bagian lampiran, memuat Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, maka sebagian besar program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi adalah memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/ Kota, disamping program dan kegiatan yang langsung ditujukan ke masyarakat. Dinas Kesehatan juga mengampu usulan program dari pemangku kepentingan yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) DIY, yang ditujukan untuk mendukung kesekretariatan (operasional).

Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
2020	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan lain	DIY	BKK Pembang una n RSUD Wates	40.810.000.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	DIY	BKK Jambanisa si	3.378.000.000
2021	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	DIY	BKK Jambanisasi	1.525.000.000
2022	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,	DIY	BKK Jambanisasi	1.525.000.000

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
	Upaya Kesehatan Masyarakat	UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	DIY	BKK Pengadaa n Alat Kesehatan RSUD Saptosari	27.427.517.771
2023	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	250.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	DIY	PMI	300.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan pelayanan Kesehatan	DIY	BKK Jambanisa si	1.525.000.000

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
		Lingkungan			
2024	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	DIY	PMI	200.000.000
2025	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	DIY	PMI	200.000.000

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut serta dengan berpedoman pada kebijakan nasional yang dituangkan dalam RKP 2026. Selain itu juga melakukan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah di DIY seperti Paradigma Abad Samudra Hindia, Keistimewaan DIY, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – *SDG's*).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 merupakan tahapan lima tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045. Posisi RKPD 2026 dalam RPJPD tersebut menjadi strategis karena menjadi salah satu tahun penentu pencapaian visi jangka panjang daerah. Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2025-2045 adalah: **“Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui **Transformasi Sosial** untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan Untuk Semua, termasuk didalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan

Peningkatan Kualitas Produk melalui **Transformasi Ekonomi** dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui **Transformasi Tata Kelola** yang Demokratis dan Transparan .
4. Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur
5. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan
6. Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah
7. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Menciptakan kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan

Kata kunci dari visi jangka panjang tersebut adalah **Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, (dijiwai) Kebudayaan yang Adiluhung/Luhur, dan (harmoni/rajutan) Keistimewaan.** Dalam melaksanakan visi misi pembangunan di atas, dirumuskan arah kebijakan yang kemudian dibagi ke dalam tahapan 5 (lima) tahunan. Setiap tahapan tersebut memiliki tema atau fokus prioritas spesifik yang tertuang dalam target pencapaian sasaran pokok. Tema atau penekanna pada tahapan pertama 5 (lima) tahunan yaitu periode 2025-2029 adalah **Penguatan Fondasi Pembangunan.**

Selanjutnya Visi Misi Arah Kebijakan tersebut diturunkan ke dalam sasaran pokok pembangunan dari RPJPD DIY Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kesehatan untuk Masyarakat DIY;
2. Meningkatnya Pendidikan di DIY yang Berkualitas dan Merata;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. Meningkatnya penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau di DIY;
6. Meningkatnya Peran Transformasi Digital;
7. Menurunnya Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Meningkatnya Peran Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
11. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro DIY;
12. Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan;

13. Terciptanya Keragaman Agama yang ber-Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
15. Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas;
16. Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
17. Terciptanya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2026 *“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”* dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut.

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Bidang Kesehatan

Prioritas Nasional	No	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kestaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Hasil Pembelajaran	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
	2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		
	3	Presentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	TPT
	4	Tingkat Penguasaan Iptek:		
	5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
	7	Usia Harapan Hidup (tahun)	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
	8	Kesehatan Ibu dan Anak : a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevelensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
	9	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		
	11	Indek Ketimpangan Gender (IKG)		
	12	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		

Sumber : RKPD 2026

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD
Tahun 2022-2027 Bidang Kesehatan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Hidup-kehidupan-penghidupan Masyarakat	1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan 2. Penghidupan ekonomi yang layak 3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal 3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan start up business 4. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 4. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan
		Meningkatkan tata kelola kalurahan	1. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kalurahan 2. Peningkatan tata kelola keuangan 3. Optimalisasi penggunaan TIK
		Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
		Pengembangan sumber-sumber PAD	1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 2. Meningkatkan pendapatan melalui potensi non pajak
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi digital	1. Memperkuat manajemen ASN 2. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi

		dan pemenuhan SPM	
		Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktivitas pemerintah
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK 3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
		Meningkatkan kemandirian fiskal	Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda
		Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	1. Meningkatkan rasa toleransi 2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 3. Meningkatkan literasi TIK masyarakat

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek kesehatan di Indonesia, termasuk transformasi kesehatan, pendanaan kesehatan, dan peran berbagai pemangku kepentingan. Upaya untuk memperkuat pendanaan kesehatan dan merencanakan transformasi Kesehatan dalam dengan UU Nomor 17 tahun 2023 terdapat Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Selanjutnya RIBK harus dijabarkan sebagai dasar dalam Renstra dan Renja Dinas Kesehatan agar Pembangunan Kesehatan dapat selaras dan konsisten. Penyusunan RIBK juga harus berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), serta menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

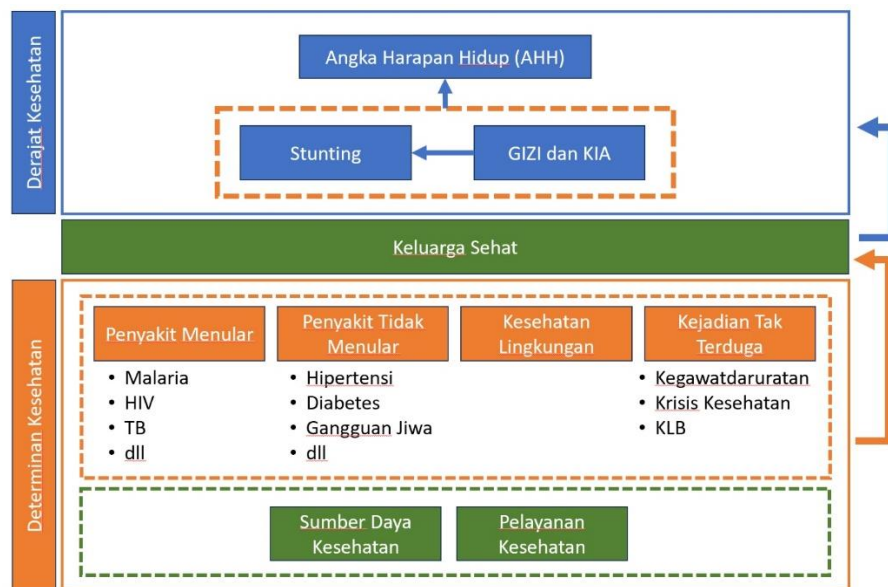
Salah satu cara untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan melihat capaian IPM. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan IPM yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita.

AHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat merupakan salah satu indikator derajat Kesehatan yang menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan. AHH

dan Stunting merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

AHH DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Selama kurun waktu 2022-2024 AHH DIY terus menunjukkan peningkatan, dari awalnya 75,11 tahun pada tahun 2022 meningkat menjadi 75,18 di tahun 2023. Tahun 2024 AHH DIY mencapai 75,36. (Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dataku Bappeda DIY, 2024)

AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan dalam hal kesehatan. Pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di Masyarakat yang akan berdampak pada angka stunting.



Gambar 3.1 Bagan pencapaian Indikator AHH dan Stunting

Stunting adalah pertumbuhan yang terhambat (tumbuh pendek). Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi Kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal. Stunting sering berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, paparan suatu penyakit, dan asupan gizi yang kurang secara kuantitas dan kualitas. Stunting merupakan

masalah kesehatan masyarakat karena berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan motorik terlambat, dan terhambatnya pertumbuhan mental. Anak-anak stunting menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat, dan lebih rentan terhadap penyakit menular.

Prevalensi balita stunting berdasarkan data dari hasil survei menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu tahun 2018-2022, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan capaian prevalensi stunting DIY sebesar 21,4% dan menurun di tahun 2019 mencapai 21,03% berdasarkan data dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Pada tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran sehubungan terjadinya pandemi covid 19, tetapi di tingkat pusat menerbitkan buku prediksi stunting sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja program stunting. Pada tahun 2020, prevalensi stunting DIY sebesar 19,88% dan berturut-turut menurun di tahun 2021 sebesar 17,3% dan tahun 2022 sebesar 16,4% berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting DIY kembali meningkat menjadi 18%. Tahun 2024 stunting di DIY mencapai 17,4% menurut SSGI 2024.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu.

Pada tahun 2022 angka kematian ibu sebanyak 43 kasus, menurun dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023 angka kematian ibu kembali meningkat menjadi 22 (per 100.000 kelahiran hidup). Kasus kematian ibu di DIY pada tahun 2024 paling dominan disebabkan karena perdarahan (8 kasus), gangguan hipertensi (7 kasus), infeksi (1 kasus), kelainan jantung dna pembuluh darah (1 kasus), gangguan cerebrovaskular (1 kasus), serta Covid-19 (1 kasus) (Sumber: Buku Data 2023 Dinas Kesehatan DIY, 2024).

Kasus persalinan remaja dan kasus ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di DIY juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut tentu saja akan meningkatkan resiko pada saat proses persalinan. Jumlah persalinan remaja (≤ 18 tahun) di DIY mencapai 302 kasus di tahun 2023 dengan kasus tertinggi di Kabupaten Sleman sebesar 88 kasus.

Beberapa penyakit menular yang menjadi permasalahan utama secara nasional menurut Kementerian Kesehatan RI adalah HIV AIDS, Tuberkulosis (TB), malaria sedangkan untuk DIY selain ketiga penyakit menular di atas, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi permasalahan karena kasusnya masih tinggi dan masih terdapat kasus kematian akibat DBD. .

Untuk penyakit TB, success rate penyakit TB pada tahun 2023 sebesar 86,9% meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 85,90. Permasalahan penanganan TB di DIY adalah masih rendahnya cakupan penemuan TB (case detection rate), tahun 2024 cakupan penemuan TB sebesar 6811 kasus. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dalam pencegahan dan pengendalian TB antara lain memperkuat kapasitas fasyankes, selain itu juga melalui pelibatan kemitraan pentahelix yang terkoordinasi dalam Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis DIY.

Arah pembangunan kesehatan DIY telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027. Sedangkan secara teknis, arah pembangunan kesehatan 2026 didasarkan pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Sebagai bagian dari tahapan akhir RPJPD DIY Tahun 2025-2045, RKPD DIY Tahun 2026 diharapkan untuk dapat memenuhi dan mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam RPJPD DIY Tahun 2025-2045. Tema pembangunan di DIY tahun 2026 yang tertuang dalam RKPD adalah “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”, tema tersebut didasarkan pada pemikiran untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan memfokuskan pada pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal, dengan mengedepankan Reformasi Kalurahan sebagai konsep sekaligus strategi untuk mencapai hal tersebut

Parameter sasaran kesehatan harus terus diupayakan untuk diperbaiki seperti angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penyiapan penanganan bencana.

Permasalahan integrasi layanan primer dalam penyediaan layanan Kesehatan yang terpadu dan berkualitas di tingkat dasar juga perlu diperhatikan dalam ketersediaan akses yang belum merata, koordinasi antar layanan yang kurang optimal, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, serta dukungan anggaran yang belum memadai.

Tantangan lainnya dalam Permasalahan Upaya Peningkatan Kesehatan adalah belum optimalnya Cek Kesehatan Gratis yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses, keterbatasan sumber daya manusia dan masalah teknis seperti ketersediaan alat.

Selain itu perlu diperhatikan permasalahan kesehatan lainnya di DIY yakni kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak yang masih perlu ditingkatkan, edukasi makanan sehat untuk keluarga dan anak usia sekolah yang belum terpadu antar stakeholder, perlunya pendampingan keluarga sehat, serta kondisi rumah sakit dan puskesmas yang belum ramah terhadap lansia, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinkes DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 3-2 Tujuan dan Sasaran Dinkes DIY

NO.	Tujuan/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
				2022	2023	2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan:Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	%	12,1	11,9	11,7	11,5	11,3	11,2
2	Sasaran: Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	%	0.31	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45

3.3 Telaah Kebijakan Nasional

RPJMN 2025-2029 memuat 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tergambar sebagai berikut:

17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumpung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Dari prioritas Presiden tersebut, terdapat 3 prioritas yang merupakan prioritas bidang Kesehatan yaitu Cek Kesehatan Gratis, Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas, dan Penuntasan Tuberkulosis. Tahun 2025 terdapat aktifitas di Dinkes DIY untuk mendukung Prioritas Presiden di bidang Kesehatan. Dukungan terhadap Prioritas Presiden tersebut tergambar dalam indikator sub kegiatan di Dinas Kesehatan DIY. Beberapa sub kegiatan yang mendukung Prioritas Presiden tersebut adalah:

No	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dukungan Anggaran
1	Cek Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp12.285.000

			Tingkat Daerah Provinsi		
2	Pembangunan RS Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp15.540.000
	Pembangunan RS Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp32.025.000
3	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp122.460.000

3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, sesuai dengan arah pembangunan kesehatan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan hal hal / isu strategis maka akan ditempuh melalui berbagai program/kegiatan yang terinci dalam usulan Dinas Kesehatan DIY tahun 2026. Secara rinci, rencana kerja yang dituangkan dalam usulan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
	DINAS KESEHATAN			47.118.787.051,00			113.234.623.136,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			46.659.158.051,00			112.791.697.136,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			46.659.158.051,00			112.791.697.136,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	37.739.830.001,00		-	103.330.563.236,00
1.02.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, panganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY	100 %	16.132.000,00	Dinas Kesehatan DIY	-	17.745.000,00
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.680.000,00	Dinas Kesehatan DIY		9.548.000,00
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.400.000,00	Dinas Kesehatan DIY		5.940.000,00
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.052.000,00	Dinas Kesehatan DIY		2.257.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	34.202.038.201,00	Dinas Kesehatan DIY	-	37.840.094.236,00
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	247 Orang/ Bulan	34.183.105.601,00	Dinas Kesehatan DIY		37.819.269.236,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.305.000,00	Dinas Kesehatan DIY		12.435.000,00
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.887.600,00	Dinas Kesehatan DIY		2.076.000,00
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	5.740.000,00	Dinas Kesehatan DIY		6.314.000,00
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	24.332.000,00	Dinas Kesehatan DIY	-	26.765.000,00
1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.200.000,00	Dinas Kesehatan DIY		2.420.000,00
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.132.000,00	Dinas Kesehatan DIY		24.345.000,00
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SDM Dinkes meningkat pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan terbaru	30 Orang	3.131.800,00	Dinas Kesehatan DIY	-	3.444.000,00
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	3.131.800,00	Dinas Kesehatan DIY		3.444.000,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	322.903.400,00	Dinas Kesehatan DIY	-	363.077.000,00
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.655.000,00	Dinas Kesehatan DIY		7.320.000,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.000.000,00	Dinas Kesehatan DIY		48.400.000,00
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.506.400,00	Dinas Kesehatan DIY		22.159.000,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.154.500,00	Dinas Kesehatan DIY		16.152.000,00
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000,00	Dinas Kesehatan DIY		3.960.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	240.637.500,00	Dinas Kesehatan DIY		264.701.000,00
1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	350.000,00	Dinas Kesehatan DIY		385.000,00
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	306.500.000,00	Dinas Kesehatan DIY	-	62.117.150.000,00
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	46.000.000,00	Dinas Kesehatan DIY		50.600.000,00
1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan DIY		62.000.000.000,00
1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.500.000,00	Dinas Kesehatan DIY		66.550.000,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	2.299.312.080,00	Dinas Kesehatan DIY	-	2.529.242.000,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	910.923.200,00	Dinas Kesehatan DIY		1.002.015.000,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.388.388.880,00	Dinas Kesehatan DIY		1.527.227.000,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	565.480.520,00	Dinas Kesehatan DIY	-	433.046.000,00
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	63.257.300,00	Dinas Kesehatan DIY		36.473.000,00
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	326.019.920,00	Dinas Kesehatan DIY		215.775.000,00
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	96.203.300,00	Dinas Kesehatan DIY		92.798.000,00
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.000.000,00	Dinas Kesehatan DIY		88.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase fasyankes terakreditasi Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Remaja Putri Anemia Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC	64 % 62.22 % 17 % 100 % 20.1 % 6.2 % 79 % 74 % 40 % 87 %	8.236.074.800,00		-	8.706.030.900,00
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	354.789.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY	-	390.267.900,00
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						
		Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	4 Dokumen	345.579.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		380.136.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
		Makanan ke Fasilitas Kesehatan					
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	9.210.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		10.131.000,00
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase K6 Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 16 Angka 100 % 87 % 100 % 93 % 100 % 98 % 71 % 90 % 100 % 100 % 97,71 % 79 % 80 % 87.36 % 252 Angka 58 % 100 % 90 %	7.713.922.800,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY	-	8.132.324.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase KN Lengkap Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase RS memenuhi standar kredensialing Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
		STBM Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam					
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1200 Orang	826.180.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		1.238.798.000,00
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66422 Orang	890.005.800,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		631.040.000,00
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	231.871.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		255.058.000,00
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	123.106.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		135.417.000,00
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	36.350.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		39.985.000,00
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	185.352.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		203.887.000,00
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	151.578.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		166.736.000,00
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1.467.010.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		1.613.711.000,00
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	392.503.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		431.753.000,00
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	2.139.763.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		2.249.192.000,00
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	113.222.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		124.544.000,00
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	33.771.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		37.148.000,00
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	50.752.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		55.827.000,00
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4 Dokumen	553.344.700,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		378.206.000,00
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6 Unit	494.950.800,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		544.445.000,00
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						
		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	832000 Keluarga	24.161.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		26.577.000,00
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	100 %	72.510.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota	-	79.761.000,00
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	72.510.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota		79.761.000,00
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan	100 %	94.853.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan	-	103.678.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
	Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Mutu dan Pemenuhan Perijinan			Kab/Kota, Masyarakat DIY		
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
		Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	32 Unit	29.233.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		32.156.000,00
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	310 Unit	65.620.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		71.522.000,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63.35 % 89 %	569.065.250,00		-	629.497.000,00
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	88.19 %	191.417.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK	-	211.882.000,00
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28428 Orang	161.477.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK		178.068.000,00
1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	8 Orang	29.940.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK		33.814.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	99.66 % 89 %	377.647.750,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK	-	417.615.000,00
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1353 Orang	285.050.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK		313.863.000,00
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen	92.597.750,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, SDMK		103.752.000,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	95 % 87,7 %	39.136.000,00		-	43.049.000,00
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100 %	28.176.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota	-	30.994.000,00
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK						
		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	46 Sarana	28.176.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota		30.994.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100 %	10.959.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota	-	12.055.000,00
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional						
		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	10.959.500,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota		12.055.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	75.052.000,00		-	82.557.000,00
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	100 %	75.052.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY	-	82.557.000,00
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						
		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	75.052.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		82.557.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			459.629.000,00			442.926.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN			459.629.000,00			442.926.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
	BIDANG KEBUDAYAAN						
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	40 %	459.629.000,00		-	442.926.000,00
2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas	100 %	459.629.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY	-	442.926.000,00
2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional						
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	1 Unit	459.629.000,00	Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Masyarakat DIY		442.926.000,00
	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI			14.703.677.150,00			14.856.282.000,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.703.677.150,00			14.856.282.000,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			14.703.677.150,00			14.856.282.000,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	9.893.372.600,00		-	10.366.282.000,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	10.730.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	12.120.000,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	10.730.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		12.120.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	14.750.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	14.750.000,00
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14.750.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		14.750.000,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 % 1 Paket	63.180.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	63.180.000,00
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.180.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		63.180.000,00
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	48.800.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	12.000.000,00
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	48.800.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		12.000.000,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.864.232.600,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	1.864.232.000,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	859.460.600,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		859.460.000,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.004.772.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		1.004.772.000,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	91.680.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	300.000.000,00
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91.680.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		300.000.000,00
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD	100 %	7.800.000.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	8.100.000.000,00
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.800.000.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		8.100.000.000,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasyankes terakreditasi	62,22 %	4.810.304.550,00		-	4.490.000.000,00
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	4.810.304.550,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY	-	4.490.000.000,00
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	1.849.780.550,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		1.500.000.000,00
1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
		Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	620.524.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		650.000.000,00
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	2.340.000.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		2.340.000.000,00
	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL			52.222.476.600,00			54.515.708.888,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			52.222.476.600,00			54.515.708.888,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			52.222.476.600,00			54.515.708.888,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	1.318.976.900,00		-	1.150.673.195,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.470.000,00	-	-	7.405.000,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	7.470.000,00	-		7.405.000,00
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	11.660.000,00	-	-	11.725.000,00
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.660.000,00	-		11.725.000,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	146.582.400,00	-	-	159.636.770,00
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.425.000,00	-		12.965.000,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.755.900,00	-		73.516.170,00
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.373.000,00	-		19.848.150,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.628.500,00	-		8.787.450,00
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	42.400.000,00	-		44.520.000,00
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	58.360.000,00	-	-	48.500.350,00
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	58.360.000,00	-		48.500.350,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	709.316.000,00	-	-	721.772.900,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	115.040.000,00	-		112.640.000,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	594.276.000,00	-		609.132.900,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	385.588.500,00	-	-	201.633.175,00
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	61.404.000,00	-		62.939.100,00
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	48.050.000,00	-		44.608.000,00
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	256.457.500,00	-		73.917.150,00
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	19.677.000,00	-		20.168.925,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	50.903.499.700,00		-	53.365.035.693,00
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	50.903.499.700,00	-	-	53.365.035.693,00
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	50.903.499.700,00	-		53.365.035.693,00
	BALAI PELATIHAN KESEHATAN			6.688.653.000,00			8.200.999.742,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.688.653.000,00			8.200.999.742,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			6.688.653.000,00			8.200.999.742,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	6.466.486.200,00		-	7.697.664.742,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	11.556.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	24.600.000,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	11.556.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		24.600.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	12.876.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	10.320.000,00
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.876.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		10.320.000,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	117.062.200,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	202.200.000,00
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.724.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		41.000.000,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.672.200,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		72.200.000,00
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.881.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		70.000.000,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.785.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		19.000.000,00
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	16.480.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	335.000.000,00
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.480.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		335.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.544.065.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	1.890.544.742,00
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		6.500.000,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	329.225.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		460.000.000,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.209.840.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		1.424.044.742,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	372.147.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	735.000.000,00
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	193.526.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		120.000.000,00
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	40.301.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		75.000.000,00
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		450.000.000,00
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	38.320.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		90.000.000,00

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	14	15	16
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.392.300.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	4.500.000.000,00
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.392.300.000,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		4.500.000.000,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	89 % 63,35 %	222.166.800,00		-	503.335.000,00
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	99,66 % 89 %	222.166.800,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY	-	503.335.000,00
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1080 Orang	222.166.800,00	Balai Pelatihan Kesehatan DIY		503.335.000,00
J U M L A H				120.733.593.801,00			190.807.613.766,00

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1. Dukungan Terhadap Program Prioritas Presiden

No	Program Prioritas Presiden	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dukungan
1	Cek Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12.285.000
2	Pembangunan RS Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.540.000
3	Pembangunan RS Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	32.025.000
4	Penuntasan TBC	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.460.000

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9

	DINAS KESEHATAN			47.118.787.051,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			46.659.158.051,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			46.659.158.051,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	37.739.830.001,00
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY	100 %	16.132.000,00
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.680.000,00
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.400.000,00
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.052.000,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	34.202.038.201,00
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	247 Orang/ Bulan	34.183.105.601,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.305.000,00
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.887.600,00
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	5.740.000,00

1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	24.332.000,00
1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.200.000,00
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22.132.000,00
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SDM Dinkes meningkat pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan terbaru	30 Orang	3.131.800,00
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	3.131.800,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	322.903.400,00
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.655.000,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.000.000,00
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.506.400,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.154.500,00
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000,00
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	240.637.500,00
1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	350.000,00

1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	306.500.000,00
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	46.000.000,00
1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00
1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.500.000,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	2.299.312.080,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	910.923.200,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.388.388.880,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	565.480.520,00
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	63.257.300,00
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	326.019.920,00
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	96.203.300,00
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.000.000,00

1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV) Persentase fasyankes terakreditasi Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Remaja Putri Anemia Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC	64 % 62.22 % 17 % 100 % 20.1 % 6.2 % 79 % 74 % 40 % 87 %	8.236.074.800,00
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	354.789.000,00
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			
		Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Dokumen	345.579.000,00
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	9.210.000,00

1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase K6 Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak	80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 16 Angka 100 % 87 % 100 % 93 % 100 % 98 % 71 % 90 % 100 % 100 % 97,71 % 79 % 80 % 87.36 % 252 Angka 58 % 100 % 90 %	7.713.922.800,00
		dan Rubella Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase KN Lengkap Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase RS memenuhi standar kredensialing Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan		

		penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam		
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1200 Orang	826.180.000,00
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66422 Orang	890.005.800,00
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	231.871.500,00
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	123.106.500,00
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	36.350.000,00
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	185.352.000,00
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	151.578.500,00
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1.467.010.000,00
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	392.503.000,00
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	2.139.763.500,00
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	113.222.000,00

1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	33.771.500,00
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	50.752.000,00
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4 Dokumen	553.344.700,00
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6 Unit	494.950.800,00
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	832000 Keluarga	24.161.000,00
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	100 %	72.510.000,00
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	72.510.000,00
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan	100 %	94.853.000,00
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
		Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	32 Unit	29.233.000,00
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	310 Unit	65.620.000,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	63.35 % 89 %	569.065.250,00

1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	88.19 %	191.417.500,00
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28428 Orang	161.477.500,00
1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	8 Orang	29.940.000,00
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	99.66 % 89 %	377.647.750,00
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1353 Orang	285.050.000,00
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen	92.597.750,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	95 % 87,7 %	39.136.000,00
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100 %	28.176.500,00
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			
		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan	46 Sarana	28.176.500,00
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100 %	10.959.500,00
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			

		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	10.959.500,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	75.052.000,00
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	100 %	75.052.000,00
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	75.052.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			459.629.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			459.629.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	40 %	459.629.000,00
2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas	100 %	459.629.000,00
2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional			
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	1 Unit	459.629.000,00
	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI			14.703.677.150,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.703.677.150,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			14.703.677.150,00

1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	9.893.372.600,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	10.730.000,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	10.730.000,00
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	14.750.000,00
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14.750.000,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 % 1 Paket	63.180.000,00
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.180.000,00
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	48.800.000,00
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	48.800.000,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.864.232.600,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	859.460.600,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.004.772.000,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	91.680.000,00
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91.680.000,00
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD	100 %	7.800.000.000,00
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.800.000.000,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasyankes terakreditasi	62,22 %	4.810.304.550,00
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100 %	4.810.304.550,00
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	1.849.780.550,00
1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			
		Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	620.524.000,00
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	2.340.000.000,00
	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL			52.222.476.600,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			52.222.476.600,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			52.222.476.600,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	1.318.976.900,00

1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.470.000,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	7.470.000,00
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	11.660.000,00
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.660.000,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	146.582.400,00
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.425.000,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.755.900,00
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.373.000,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.628.500,00
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	42.400.000,00
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	58.360.000,00
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	58.360.000,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	709.316.000,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	115.040.000,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	594.276.000,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	385.588.500,00
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	61.404.000,00
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	48.050.000,00
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	256.457.500,00
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	19.677.000,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	50.903.499.700,00
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	50.903.499.700,00
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	50.903.499.700,00
	BALAI PELATIHAN KESEHATAN			6.688.653.000,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.688.653.000,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			6.688.653.000,00

1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,36 Nilai	6.466.486.200,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	11.556.000,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	11.556.000,00
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah	100 %	12.876.000,00
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.876.000,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	117.062.200,00
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.724.000,00
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.672.200,00
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.881.000,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.785.000,00
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	16.480.000,00
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.480.000,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	1.544.065.000,00
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00

1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	329.225.000,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.209.840.000,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	100 %	372.147.000,00
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	193.526.000,00
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	40.301.000,00
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	38.320.000,00
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.392.300.000,00
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.392.300.000,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	89 % 63,35 %	222.166.800,00
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	99,66 % 89 %	222.166.800,00
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1080 Orang	222.166.800,00
J U M L A H				120.733.593.801,00

BAB 5 PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Kesehatan DIY pada tahun anggaran 2026. Renja ini merupakan bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2026.

Renja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2026 diharapkan menjadi dasar dalam proses penyesuaian dan penetapan alokasi anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY maupun dari sumber pendanaan lainnya. Selain itu, dokumen ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dan integrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan.

Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian tahapan perencanaan program dan anggaran secara sistematis, dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan DIY



drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes



**DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Jl. Gondosuli No 6 Umbulharjo, Yogyakarta

Telp: (0274) 563153 Faks: (0274) 512368

Website: <https://dinkes.jogjaprov.go.id/>

Email: dinkes@jogjaprov.go.id